

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Indra dan Irvan, 2006:135). Pengertian komisaris independen berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (KNKG, 2013).

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Disadari bahwa menurut UUPT semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Dengan demikian tanpa harus mempertentangkan, pengertian Komisaris Independen di dalam UUPT sama dengan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan Independen adalah cara pandang atau penyelesaian

masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan (KNKG, 2013).

Komisaris Independen berperan penting dalam hal kepentingan manajemen, perusahaan, dan pemegang saham berbeda, seperti dalam pengambilan keputusan atas aksi korporasi. Independensi anggota Komisaris Independen tergantung kepada beberapa hal, di antaranya lama periode menjabat sebagai Komisaris Independen di perusahaan tersebut (OJK, 2014:50).

2.1.1.1 Tugas-Tugas Utama Dewan Komisaris Independen

Undang-Undang Perseroan Terbatas Tugas komisaris independen tidak diatur secara rinci, akan tetapi secara umum tugas dari pada komisaris termasuk juga komisaris independen adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi (Firi, 2015:35).

Tugas komisaris yang utama adalah mengawasi pekerjaan direksi, dimana tugas pengawasan ini meliputi:

- a. Pengawasan preventif, tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, yang dapat merugikan perseroan yang dilakukan oleh direksi;
- b. Pengawasan represif, untuk mengontrol tindakan direksi, apakah semua tindakan yang telah dilakukannya tidak merugikan perseroan ataukah tidak bertentangan dengan akta pendirian/atau anggaran dasar dan undang-undang, dan apakah segala sesuatu yang telah ditentukan di dalam RUPS telah dijalankan. Apabila Direksi dalam tindakannya bertentangan dengan anggaran dasar atau undang-undang ataupun keputusan RUPS maka dapat diberhentikan untuk sementara (*geschort*),

namun apabila dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dapat diangkat kembali.

Tugas yang wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut, Dewan Komisaris wajib (Firi, 2013:35):

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus jalannya perusahaan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi;
2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

2.1.1.2 Tanggung Jawab Komisaris Independen

Sebuah perusahaan, kita mengenal adanya direksi dan manajemen. Namun, ada sebuah peran penting lagi dalam sebuah perusahaan yaitu peran dari Komisaris. Dalam undang-undang perseroan Terbatas perkataan komisaris meliputi dua pengertian, yang pertama adalah organ perseroan yang lazim dikenal dengan nama Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Komisaris. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Pada umumnya dalam praktek kegiatan perseroan, Komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan, termasuk untuk menyetujui laporan Tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam rapat Umum Pemegang Saham tahunan perseroan wajib (Firi, 2013:35).

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris diatur didalam Pasal 114 undang-undang perseroan:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1);
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 108 ayat (2).

2.1.1.3 Ukuran Komisaris Independen

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2016), komisaris independen merupakan komisaris yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kriteria komisaris independen diambil oleh FCGI dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *Outside Directors*. Kriteria untuk *Outside Directors* dalam *One Tier System* tersebut telah diterjemahkan menjadi kriteria untuk komisaris independen dalam *position paper* FCGI kepada NCCG. Kriteria tentang komisaris independen tersebut adalah sebagai berikut (FCGI, 2016:7-8):

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan

secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;

3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Adanya Dewan Komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi

pengawasan dalam perusahaan. Semakin besar proporsi Komisaris Independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik (Noviawan dan Septiani, 2013 dalam Azzahrah dkk, 2014).

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/14/PBI/2006 pasal 5 disebutkan bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Komisaris Independen diukur berdasarkan persentase jumlah Komisaris Independen terhadap jumlah total Komisaris yang ada dalam susunan Dewan Komisaris perusahaan (Ningrum dan Rahardjo, 2012 dalam Azzahrah dkk, 2014).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

2.1.2 *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:150) *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya, besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiyai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.

Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang

2.1.2.1 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut (Kasmir, 2014:153) terdapat beberapa tujuan dan manfaat perusahaan menggunakan *leverage* :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur),
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, dan
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

2.1.2.2 Rasio *Leverage*

Biasanya penggunaan rasio *leverage* dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio *leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio *leverage* yang ada. Rasio yang digunakan penulis yaitu :

Debt To Assets Ratio (debt ratio), merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva (Kasmir, 2014:156).

$$\text{Rumus: } \textbf{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \dots\dots\dots(2)$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)* sebagai indikator leverage. Pemilihan *Debt to Asset Ratio (DAR)* sebagai indikator karena apabila *leverage* suatu perusahaan tinggi perusahaan cenderung akan melakukan manajemen laba untuk bertahan dari pelanggaran

perjanjian utang dengan melaporkan laba lebih tinggi untuk menjaga kredibilitasnya di mata kreditor (Prastiti & Meinarto, 2013:12).

2.1.3 Manajemen Laba

Ada alasan mendasar mengapa manajer melakukan manajemen laba. Harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar dibandingkan prosentase kenaikan laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko (Sulistyanto, 2014).

Secara logika hal itu bisa dipahami karena manusia merupakan pribadi yang cenderung menghindari risiko (*risk adverse*) yang selalu berusaha mengeliminasi atau meminimalkan kerugian yang mungkin akan dialaminya, walaupun upaya yang dilakukannya mungkin merugikan pihak lain. Kondisi inilah yang mengakibatkan sampai saat ini manajemen laba masih dipertanyakan apakah merupakan aktivitas yang melanggar prinsip akuntansi berterima umum atau bukan.

Inilah yang mengakibatkan sampai saat ini ada atau belum ada kesepakatan di kalangan akademisi maupun antara akademisi dengan praktisi mengenai definisi manajemen laba yang diakibatkan perbedaan pandangan terhadap manajemen laba. Sebagian pihak menilai manajemen laba merupakan perbuatan curang yang melanggar prinsip akuntansi. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan metode dan standar akuntansi yang ada untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

Sementara sebagian yang lain menilai manajemen laba sebagai aktivitas yang lumrah dilakukan manajer dalam menyusun laporan keuangan, apalagi jika upaya rekayasa manajerial ini dilakukan dalam ruang lingkup prinsip akuntansi. Hal inilah yang menyebabkan setiap pihak yang *concern* pada permasalahan ini mencoba untuk mendefinisikan manajemen laba sesuai dengan penilaian dan pemahamannya, baik secara positif maupun negatif. Akibatnya, saat ini ada cukup banyak definisi dan batasan mengenai manajemen laba yang membuat spektrum upaya rekayasa manajerial ini menjadi luas.

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Definisi manajemen laba yang diciptakan oleh Davidson, Stickney, dan Weil (1987), Fisher dan Rosenzweig (1995), Lewitt (1998), serta Healy dan Wahlen (1999)

1. Davidson, Stickney, dan Well

Earnings management is the process of taking deliberates steps within the constrains of generally accepted accounting principles to bring about desired level reported earnings (Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan).

2. Schipper

Earnings management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain (a opposed to say, merely facilitating the neutral operating of the process (Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).

3. National Association of Certified Fraud Examiners

Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan yang menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).

4. Fisher dan Rosenzweig

Earnings management is a actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long-term economic profitability of the unit (Manajemen Laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang).

TABEL 2.1
Penyimpangan Korporasi di Indonesia

Kekayaan perusahaan disalahgunakan oleh orang dalam Diabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas Ketidakterbukaan informasi bisnis Penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pribadi Keputusan yang diambil karena <i>moral hazard</i> Intervensi pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan Praktik perusahaan dalam perusahaan <i>High leverage</i> tapi tidak mempertimbangkan <i>service capacity</i> Diversifikasi dan ekspansi usaha dengan tidak <i>prudential</i> Risiko tidak dikelola dengan hati-hati Bank digunakan sebagai kasir kelompok usaha Praktik <i>transfer pricing</i> antar <i>affiliated companies</i>
--

sumber : Djalil, 2002

Secara makro, manajemen laba telah membuat dunia usaha seolah berubah menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi dan berbagai penyelewengan lain yang merugikan publik. Publik menganggap apa yang diinformasikan dunia usaha hanya merupakan akal-akalan pelakunya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Tidak aneh jika pada akhir dasawarsa 1980-an kasus *creative accounting* ini menyebabkan *good corporate governance* menjadi perhatian publik di Inggris (Sulistyanto, 2014).

Demikian juga dengan kasus-kasus kecurangan korporasi di Indonesia yang terbukti menjadi salah satu penyebab runtuhnya perekonomian negara ini atau skandal keuangan Enron, Worldcom, dan Xerox yang menyebabkan publik Amerika Serikat meragukan integritas dan kredibilitas para pelaku dunia usaha. Skandal ini bahkan tidak hanya membuat perusahaan yang melakukannya mengalami kebangkrutan namun juga mengakibatkan para pelakunya diseret ke pengadilan sebagai pelaku kejahatan ekonomi.

Namun upaya yang dilakukan KAP Arthur Andersen & Co di Amerika Serikat untuk melegalisasi atau menyembunyikan penyelewengan yang dilakukan kliennya ternyata tidak hanya meruntuhkan KAP Arthur Andersen

& Co di negara itu tetapi seluruh afiliasinya di seluruh dunia. Lebih menarik lagi, KAP ini runtuh tanpa harus melewati proses pengadilan, namun hanya karena di jauhi oleh klien dan publik yang menganggapnya sebagai pesakitan. Skandal keuangan yang melibatkan KAP ini berdampak secara luas terhadap bisnis internasional.

2.1.3.2 Konsep Manajemen Laba

Terdapat beberapa manajemen laba (Sulistyanto, 2014)., antara lain

1. “Bonus Scheme Hypothesis

Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. Contracting Incentive

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur, seperti *dividen* yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas berada dibawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi, manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. Political Motivation

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. Taxation Motivation

Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. Incentive Chief Executive Officer (CEO)

CEO yang mendekati masa pension akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan yang akan *go public* belum tentu memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.”

2.1.3.3 Tujuan Permainan Manajerial

Ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk memperlakukan besar kecilnya laba, yaitu dengan mengakui dan mencatat laba pendapatan terlalu cepat atau sebaliknya, mengakui dan mencatat pendapatan palsu, mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih lambat dari yang

seharusnya, dan tidak mengungkapkan kewajibannya (Sulistyanto, 2014). Berikut ada beberapa cara dan penjelasan tujuan perminan manajerial :

- a. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.

Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapat periode berjalan (*current revenue*).

- b. Mengakui Pendapatan lebih cepat datu periode lebih.

Upaya ini dilakukan mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya. Pendapatan periode berjalan menjadi lebih pendapatan periode sebelumnya. Semakin kecil pendapatan akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi semakin kecil daripada laba sesungguhnya.

- c. Mencatat pendapatan palsu.

Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatn ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada pendapatn sesungguhnya.

- d. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat.

Upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biayay periode-periode yang akan datang sebagai periode berjalan (*current cost*). Meningkatnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya.

- e. Mengakui dan mencatat biaya lebih lambat.

Upaya ini dapat dilakukan dengan mengakui biaya periode berjalan menjadi periode sebelumnya. Hingga biaya periode berjalan menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Akibatnya, membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih baik atau besar bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya.

- f. Tidak mengungkapkan semua kewajiban.

Upaya ini dilakukan manajer dengan cara menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya.

2.1.3.4 Komponen Manajemen Laba

Manajemen laba di ukur dengan proksi *discretionary accrual* Modified Jones Model karena berdasar (Dechow, dalam sari dan astika 2015) model ini lebih baik dibanding model Jones standar dalam mengukur kasus manipulasi pendapatan.

Kemudian menghitung nilai total *accrual* (TAC) :

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots (3)$$

Menentukan nilai parameter α_1 , α_2 , dan α_3

$$TAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta REV_{it} + \alpha_3 \Delta PPE_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (4)$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas maka dapat dihitung nilai *nondiscretionary accrual* (NDTA) dengan rumus :

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 i \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 i \left(\frac{(\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 i \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \epsilon \dots\dots\dots (5)$$

Discretionary accrual (DTA) merupakan residual yang diperoleh dari estimasi total *accrual* yang dihitung sebagai berikut :

$$DTAC = \left(\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} \right) - NDTAC_{it} \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan:

DTAC_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada periode t

NDTAC_{it} = *Non Discretionary accrual* perusahaan i pada periode t

NI_{it} = *Net income* perusahaan i pada periode t

TAC_{it} = Total *accrual* perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Aliran arus kas operasi perusahaan i pada periode t

TA_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode t

ΔREV_{it} = Perubahan penjualan perusahaan i pada periode t

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada periode t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t

ε_{it} = *error*

2.1.2 Kerangka Pemikiran

Pada saat ini perusahaan ditekankan untuk memperoleh tingkat laba yang tinggi sehingga pihak investor atau stakeholder tidak merasa kecewa dengan hasil kinerja perusahaan yang benar. Tidak hanya untuk meningkatkan laba dengan alih memberikan hasil yang maksimal bagi investor tetapi juga memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Maka dari itu Kedudukan Komisaris Independen sangat kritikal agar pengambilan keputusan yang bersifat objektif dalam mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan.

Komisaris independen akan memberi masukan jika terjadi penyimpangan pengelolaan usaha untuk membantu dewan komisaris sebagai kekuatan penyeimbang independen di dalam suatu perusahaan tinggi maka

praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut tinggi dan sebaliknya. Kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen dan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya menjadi tidak efektif. Besarnya proporsi dewan komisaris independen juga dapat menyebabkan terjadinya koordinasi yang tidak efektif di antara dewan komisaris independen sehingga kinerja dewan komisaris independen menjadi menurun (Fioren, 2017:114).

Pengaruh Komisaris Independen dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, Komisaris Independen seharusnya dapat mengawasi kinerja direksi yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Komisaris Independen diukur berdasarkan persentase jumlah Komisaris Independen terhadap jumlah total Komisaris yang ada dalam susunan Dewan Komisaris perusahaan (Ningrum dan Rahardjo, 2012 dalam Azzahrah dkk, 2014).

Penelitian Afifa Nabila dan Daljono (2013) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan dalam manajemen laba. karena pihak independen tidak memiliki ikatan atau kepentingan terhadap pihak manajemen, sehingga terbebas dari tekanan dan intervensi manajerial. Semakin banyaknya pihak independen dalam komisaris maka proses pengawasan yang dilakukan akan semakin berkualitas seiring dengan banyaknya tuntutan pihak independen yang menginginkan adanya transparansi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fioren dan Ita (2017), Wafa (2008), Irvan dan Heryanto (2015), Edgina (2008), Rezki (2017), Nasution dan Setiawan (2007), Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa

komposisi dewan komisaris berpengaruh negative terhadap manajemen laba perusahaan.

Leverage mengukur sejauh mana aktiva dibiayai oleh hutang. Menurut Kasmir (2013:151) menyatakan bahwa rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan indikator *debt ratio* dimana total liabilitas dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

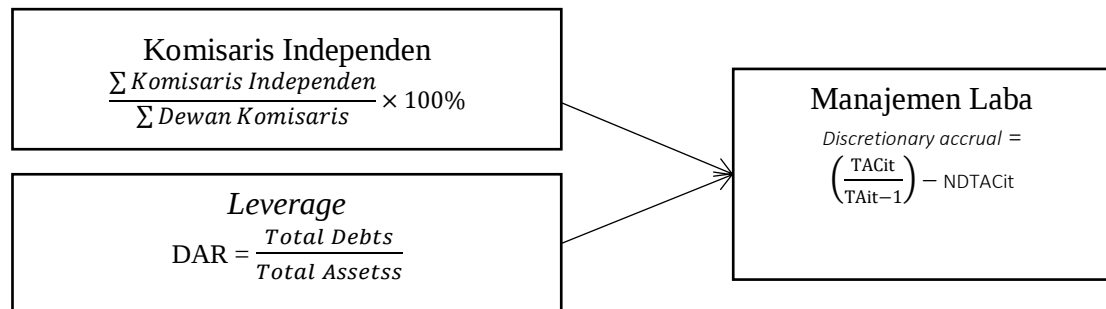
Dalam penelitian Agustia (2013), Prastiti dan Meinarto (2013), Ayu, Elva dan Anggita (2017), Ni Putu dan Maria (2016) menunjukkan bahwa *leverage* positif. Menurut Veliandina Chivan Naftalia dan Marsono (2013) *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba karena besarnya tingkat hutang perusahaan (*leverage*) dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. *Leverage* yang tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Oleh karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan *leverage* yang tinggi, juga akan meningkatkan tindakan *opportunistic* seperti manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan public. Berbeda dengan penelitian Rahmita (2013), Taufik (2017), Sari dan Asyik (2013), *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang berarti apabila *leverage* dalam suatu perusahaan tinggi maka praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut rendah. Hal ini dapat terjadi karena nilai hutang yang rendah disebabkan oleh tingginya tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan agar laporan keuangan terlihat baik untuk meyakinkan para kreditor dan menarik investor.

Pada setiap perusahaan pasti ingin memiliki kondisi keuangan yang baik karena dapat menjadikan suatu penilaian untuk para investor. Namun di sisi lain banyak pihak manajemen yang ingin memanfaatkan kegiatan akuntansi untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan yang dimana informasi keuangan tersebut dijadikan sebagai tampilan untuk memenuhi kepercayaan investor.

Menurut Sulistyanto (2014:48) manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan dilakukannya *earning management* dalam laporan keuangan dapat diteliti menggunakan *discretionary accrual* yang terdiri dari beberapa indikator yaitu laba bersih (*net income*), kas dari operasi (*cash flow operation*), total akrual (*total accrual*), total aktiva (*total asset*), perubahan pendapatan perusahaan pada tahun yang ditentukan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya, perubahan piutang perusahaan pada tahun yang ditentukan dikurangi piutang pada tahun sebelumnya dan total aktiva tetap.

Sesuai konsep penelitian terdahulu bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifa Nabila dan Daljono (2013), Fioren dan Ita (2017), Wafa (2008), Irvan dan Heryanto (2015), Edgina (2008), dan Rezki (2017). *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013), Prastiti dan Meinarto (2013), Ayu, Elva dan Anggita (2017), Ni Putu dan Maria (2016), dan Veliandina Chivan Naftalia dan Marsono (2013).

Menurut kerangka pemikiran diatas penulis membuat paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2016:64) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Komisaris Independen secara parsial dan simultan diduga berpengaruh terhadap manajemen laba pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi;
2. *Leverage* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap manajemen laba pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi;